

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika politik Indonesia, isu identitas menjadi salah satu faktor penting yang membentuk orientasi dan perilaku politik masyarakat. Politik tidak lagi sekadar dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang artikulasi nilai, keyakinan, dan identitas suatu kelompok sosial. Fenomena ini tampak dari menguatnya ekspresi politik berbasis agama, budaya, dan nilai-nilai lokal dalam berbagai proses politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan realita tersebut, agama seringkali menjadi sumber legitimasi sekaligus sarana mobilisasi politik yang mampu memengaruhi arah representasi dan kebijakan publik.

Salah satu wujud politik identitas berbasis agama di Indonesia muncul melalui organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki jangkauan sosial luas. Nahdlatul Ulama (NU) hadir sebagai organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia (Maghfiroh, 2023). Organisasi ini berperan tidak hanya dalam ranah keagamaan, tetapi juga pendidikan, sosial, dan politik. Tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) yang berkembang di kalangan Nahdliyin menjadi basis nilai yang membentuk orientasi sosial-keagamaan dan norma politik komunitas tersebut, termasuk sikap moderat, toleransi, dan penekanan pada keseimbangan (*tawasuth, tawazun, i'tidal*). Meskipun NU bukan partai politik, nilai-nilai keaswajaan ini memengaruhi aktor-aktor politik dan menjadi modal sosial bagi partai-partai yang memiliki basis ideologi NU.

Di tingkat lokal, Kota Bogor merupakan arena politik yang menarik untuk menjadi lokus kajian mengenai hubungan antara identitas keagamaan dan praktik representasi politik. Data demografis yang diakses melalui BPS Kota Bogor (2024) menunjukkan bahwa sekitar 93,48%

penduduk Kota Bogor adalah Muslim, dan keberadaan pondok pesantren serta lembaga pendidikan Islam relatif besar, yang menunjukkan basis sosial Nahdliyin yang kuat. Namun, struktur sosial Kota Bogor juga plural: kota ini menampung berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk masyarakat Tionghoa serta pendatang dari berbagai daerah, sehingga menuntut keterwakilan publik yang inklusif. Kondisi ini menciptakan dinamika khusus: yaitu dominasi sosial-keagamaan tertentu di satu sisi, dan tuntutan pluralitas publik di sisi lain.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Fraksi Aswaja di DPRD Kota Bogor menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Fraksi ini dibentuk dari gabungan dua partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Awalnya, penggabungan ini dilakukan untuk memenuhi syarat administratif pembentukan fraksi di DPRD, karena masing-masing partai tidak memiliki jumlah kursi yang cukup untuk membentuk fraksi sendiri. Namun, kerja sama ini kemudian menemukan dasar ideologis yang kuat karena keduanya sama-sama berakar pada tradisi dan nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Atas dasar kesamaan tersebut, fraksi gabungan ini menamakan diri sebagai “Fraksi Aswaja”. Penggunaan nama Aswaja tidak sekadar simbol keagamaan, melainkan representasi nilai dan identitas keislaman yang ingin diartikulasikan dalam ruang politik daerah. Melalui fraksi ini, nilai-nilai keaswajaan yang berakar pada ajaran moderasi, keseimbangan, dan toleransi diupayakan untuk hadir dalam proses legislasi serta kebijakan publik di tingkat kota. Keberadaan Fraksi Aswaja mencerminkan bagaimana ideologi keagamaan dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik representatif yang meneguhkan nilai-nilai Nahdliyin dalam sistem demokrasi lokal.

Adapun komposisi anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor Periode 2024–2029 dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan nama anggota serta partai asalnya.

Tabel 1.1 Komposisi Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029 (Sumber : DPRD Kota Bogor, 2024)

Nama	Asal Partai
Lusiana Nurissiyadah	PKB
Tri Kisowo Jumino	PKB
Edi Kholki Zaelani	PKB
Jatirin	PKB
Wishnu Ardiansyah	PPP
Ahmad Aswandi	PPP
Akhmad Saeful Bakhri	PPP

Meskipun awalnya dibentuk untuk memenuhi syarat administratif agar kedua partai memiliki wadah di lembaga legislatif, fraksi ini berkembang menjadi ruang politik yang membawa semangat nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kolaborasi ideologis ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas partai dapat dilandasi oleh kesamaan nilai keagamaan yang moderat, serta menjadi sarana bagi Nahdliyin dalam memperjuangkan representasi politik yang berakar pada tradisi keaswajaan di tingkat lokal.

Secara struktural, DPRD Kota Bogor terdiri dari beberapa fraksi yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil Pemilu 2024 yang dibuktikan dengan data dari laman resmi DPRD Kota Bogor yang menyatakan bahwa DPRD Kota Bogor memiliki 8 fraksi, 6 fraksi di isi oleh masing-masing 1 partai, dan 2 fraksi lainnya merupakan gabungan dari 2 partai. Fraksi yang di isi oleh 1 partai adalah : PKS, GOLKAR, GERINDRA, PDI-P, PAN, dan NASDEM. Sedangkan 2 fraksi lainnya adalah ASWAJA yang merupakan gabungan dari partai PKB dan PPP, serta DEMOKRAT SOLIDARITAS berisi Partai DEMOKRAT dan PKS.



Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. Fraksi - Fraksi di DPRD Kota Bogor pada periode 2024-2029 terdiri dari Fraksi : PKS, GOLKAR, GERINDRA, PDI-P, PAN, NASDEM, ASWAJA (PKB-PPP), DEMOKRAT SOLIDARITAS (DEMOKRAT-PSI).

Gambar 1.1 Daftar Fraksi di DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029

(Sumber: dprd.kotabogor.go.id, diakses November 2025)

Meskipun kehadiran Fraksi Aswaja mencerminkan upaya artikulasi nilai-nilai keaswajaan dalam politik daerah, praktik representasi tersebut tidak lepas dari tantangan. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal yang dilakukan kepada Sekertaris Fraksi Aswaja, Edi Kholki Zaelani menyatakan bahwa "Fraksi Aswaja menghadapi dilema antara mempertahankan komitmen ideologis Nahdliyin dan memenuhi tuntutan representasi yang bersifat inklusif. Di satu sisi, nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi landasan moral dan identitas politik fraksi. Namun di sisi lain, pluralitas masyarakat Kota Bogor menuntut kemampuan untuk menempatkan nilai tersebut secara kontekstual agar tidak menimbulkan eksklusivitas". Dinamika inilah yang menjadikan Fraksi Aswaja menarik untuk dikaji sebagai representasi politik identitas di tengah masyarakat yang beragam.

Fenomena representasi identitas Nahdliyin di lembaga legislatif daerah masih jarang menjadi fokus penelitian politik identitas di Indonesia. Selama

ini, kajian yang mengangkat hubungan antara NU dan politik lebih banyak membahas perilaku elektoral, strategi partai Islam, atau hubungan antara elite NU dan partai berbasis Islam. Padahal, dinamika representasi di tingkat legislatif daerah juga merefleksikan bagaimana nilai ideologis dinegosiasikan dalam ruang kekuasaan yang plural (Rotua & Prasetio, 2019).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Robi Ulzickri (2019), dengan judul “Politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)” menunjukkan bahwa kader dan elite NU memiliki pola pikir dan perilaku politik yang beragam, mulai dari NU struktural dan kultural hingga yang aktif di politik formal, yang secara intens melakukan komunikasi dan konsolidasi dalam merespons aspirasi Nahdliyin. Namun, keterbatasan dalam representasi aspirasi politik ini tetap menjadi tantangan, sehingga kajian mengenai representasi Nahdliyin di DPRD seperti Fraksi Aswaja di Bogor menjadi sangat relevan untuk memahami negosiasi ideologi dan praktik politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, studi mengenai Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memperlihatkan bagaimana ideologi keaswajaan dijalankan dalam praktik politik representatif yang sarat kompromi dan adaptasi terhadap konteks sosial.

Meskipun kehadiran Fraksi Aswaja mencerminkan upaya artikulasi nilai-nilai Nahdliyin dalam ruang politik daerah, terdapat ketegangan antara identitas tersebut dengan tuntutan representasi DPRD yang bersifat inklusif. Di satu sisi, penggunaan identitas Aswaja menimbulkan ekspektasi bahwa kepentingan dan nilai-nilai Nahdliyin dapat direpresentasikan secara lebih spesifik. Namun di sisi lain, dalam praktiknya kebijakan yang dihasilkan DPRD Kota Bogor cenderung bersifat umum dan belum secara eksplisit merefleksikan artikulasi kepentingan dan nilai-nilai Nahdliyin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas yang diusung dengan manifestasi kebijakan yang dihasilkan, yang menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks representasi politik identitas di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk representasi politik identitas Nahdliyin diwujudkan oleh Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029?
2. Bagaimana pandangan kalangan Nahdliyin di Kota Bogor terhadap upaya representasi politik yang dilakukan oleh Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor pada Periode 2024-2029?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk representasi politik identitas Nahdliyin yang diwujudkan oleh Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029
2. Untuk mengidentifikasi pandangan kalangan Nahdliyin Kota Bogor terhadap upaya representasi politik yang dilakukan oleh Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor pada Periode 2024-2029

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik maupun secara praktis.

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi politik identitas dan representasi di Indonesia. Kontribusi utamanya adalah dengan mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada politik identitas di tingkat nasional. Penelitian ini menyajikan model empiris tentang bagaimana strategi fraksi gabungan yang berbasis ideologi Aswaja di tingkat daerah mampu menegosiasikan idealisme keagamaan dengan pragmatisme politik lokal, sehingga

menawarkan perspektif baru bagi pengembangan teori-teori tentang partai politik dan artikulasi nilai-nilai sosial keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung, terutama bagi Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor sebagai bahan evaluasi strategis untuk merumuskan langkah politik yang lebih efektif dan konsisten dengan nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menjadi alat informasi transparan bagi konstituen Nahdliyin untuk mengukur sejauh mana aspirasi dan identitas mereka benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan dalam kebijakan daerah. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, kajian ini diharapkan dapat menjadi wawasan penting mengenai dinamika politik berbasis identitas, yang berguna dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep teoritis, definisi operasional, dan fenomena empiris yang dikaji, serta menjadi panduan logis dalam menganalisis strategi Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor dalam mewujudkan nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa identitas keagamaan merupakan unsur fundamental dalam dinamika sosial politik Indonesia (Ridwan, 2025). Identitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dan solidaritas politik yang mendorong lahirnya perilaku kolektif dalam arena demokrasi. Dalam konteks ini, politik identitas Nahdliyin menjadi manifestasi nyata dari keterikatan masyarakat yang berafiliasi dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama (NU) dan berupaya menegosiasikan kepentingannya di ruang publik. Identitas Nahdliyin yang berakar pada nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* tidak hanya

menegaskan sisi spiritualitas, tetapi juga menjadi dasar pembentukan orientasi politik kelompok.

Kehadiran Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor merepresentasikan upaya artikulatif kelompok Nahdliyin dalam memperjuangkan nilai-nilai tersebut di tingkat legislatif daerah. Fraksi ini menjadi wadah bagi terwujudnya politik identitas dalam bentuk representasi formal dan substantif di lembaga politik lokal. Melalui Fraksi Aswaja, nilai-nilai Aswaja diartikulasikan ke dalam kebijakan dan keputusan politik daerah yang mencerminkan aspirasi masyarakat Nahdliyin. Dengan demikian, Fraksi Aswaja dapat dipandang sebagai aktor politik yang menjembatani antara identitas keagamaan dengan tindakan politik praktis di tingkat lokal.

Teori Politik Identitas yang dikemukakan oleh Stuart Hall digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas Nahdliyin terbentuk, dipertahankan, serta diekspresikan dalam praktik politik Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara nilai, kepentingan, dan konteks sosial tertentu. Politik identitas pada dasarnya merupakan strategi kolektif untuk memperjuangkan pengakuan, representasi, dan kepentingan kelompok berdasarkan kesamaan nilai atau keyakinan (Setyaningrum, 2005). Dalam konteks penelitian ini, teori politik identitas menjelaskan bagaimana nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dijadikan sumber legitimasi politik dan dasar perjuangan oleh aktor-aktor politik Nahdliyin melalui Fraksi Aswaja di DPRD Kota Bogor.

Sementara itu, Teori Representasi Politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin digunakan untuk menilai sejauh mana Fraksi Aswaja mampu menjalankan fungsi representasi terhadap aspirasi masyarakat Nahdliyin. Pitkin dalam (Nasrudin & Nurdin, 2018) membedakan antara representasi formal dan representasi substantif. Representasi formal berkaitan dengan kehadiran wakil rakyat dalam lembaga politik sebagai simbol keberadaan

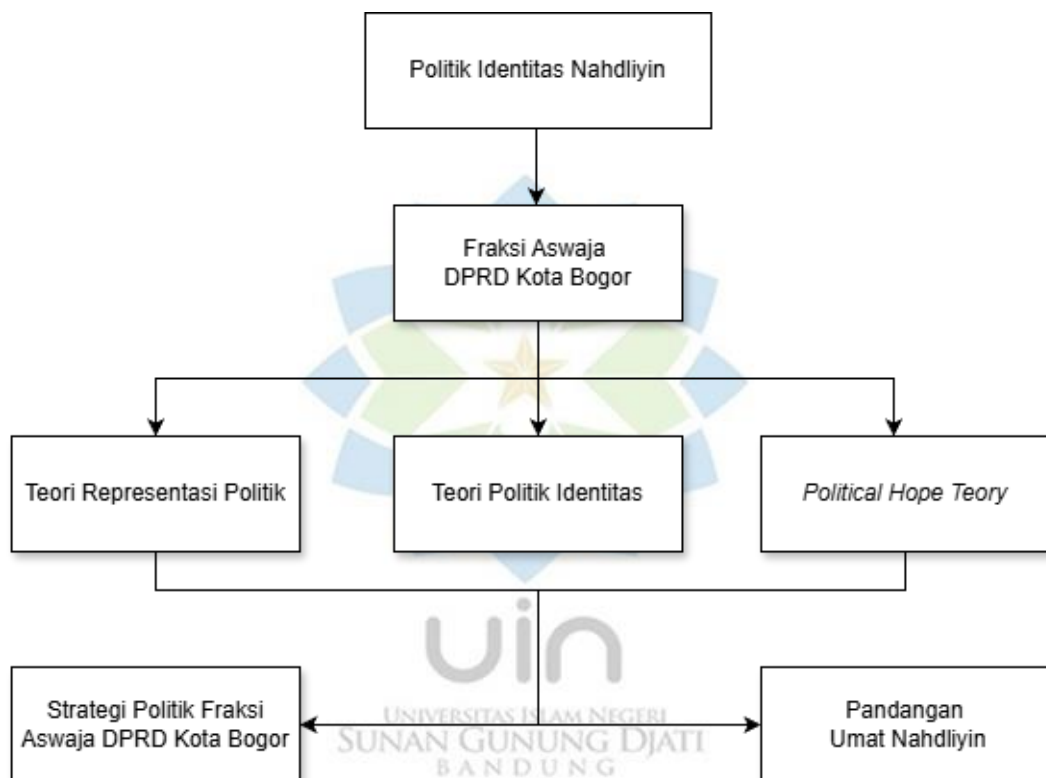
kelompok tertentu, sedangkan representasi substantif menekankan pada sejauh mana tindakan politik wakil tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai konstituennya. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis apakah Fraksi Aswaja tidak hanya hadir sebagai simbol identitas Nahdliyin di lembaga legislatif, tetapi juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja dalam kebijakan publik dan aktivitas politiknya.

Berdasarkan kedua teori tersebut, strategi Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor dalam mewujudkan nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara identitas keagamaan, posisi politik, dan tanggung jawab representatif. Strategi tersebut mencakup langkah-langkah politik, komunikasi, dan kebijakan yang digunakan untuk menginternalisasi nilai-nilai Aswaja ke dalam keputusan legislatif dan kebijakan publik daerah. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggambarkan alur logika penelitian yang dimulai dari politik identitas Nahdliyin sebagai fenomena sosial, dihubungkan melalui teori politik identitas dan teori representasi politik, kemudian bermuara pada analisis strategi Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor sebagai bentuk konkret penerapan nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* di ranah politik lokal.

Di sisi lain, pandangan Nahdliyin di Kota Bogor terhadap upaya representasi politik yang dilakukan oleh Fraksi Aswaja juga menjadi dimensi penting dalam penelitian ini. Secara umum, warga Nahdliyin menaruh harapan agar Fraksi Aswaja tidak hanya menjadi simbol identitas kultural keagamaan di DPRD, tetapi benar-benar menghadirkan politik yang berpihak pada kemaslahatan umat, memperjuangkan kebijakan yang selaras dengan nilai *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil), serta responsif terhadap persoalan riil masyarakat seperti pendidikan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan penguatan peran lembaga keagamaan lokal. Harapan tersebut mencerminkan tuntutan representasi substantif sebagaimana dikemukakan dalam teori representasi politik, di mana legitimasi Fraksi Aswaja di mata konstituen Nahdliyin tidak semata ditentukan oleh

kedekatan identitas, tetapi oleh konsistensi tindakan politik dan keberpihakan nyata terhadap aspirasi serta nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dalam kebijakan publik daerah.

Dengan demikian, peneliti menggambarkan skema pemikiran penelitian ini dengan ilustrasi gambar sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Skema Kerangka Berpikir